

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

Bagian ini akan mencakup gagasan dasar yang mendasari penelitian dan memberikan aturan untuk analisis. Kajian ini mengkaji dampak jumlah sektor unggulan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Riau pada tahun 2012 hingga tahun 2022. Selain itu, kajian-kajian lain yang terdahulu terkait dengan hal yang diteliti juga akan ditampilkan.

##### **2.1.1 Pengertian Sektor Unggulan**

Indonesia terdiri dari banyak pulau, dan masing-masing wilayah menunjukkan kerangka ekonomi yang berbeda-beda. Struktur perekonomiannya sangat bervariasi dan terdiri dari beberapa sektor yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Menurut Badan Pusat Statistik (2016) terdapat 17 sektor yang mendukung perekonomian nasional, yang mencakup sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik, Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa Lainnya.

Memiliki kekuatan distribusi di atas rata-rata pada suatu sektor belum tentu menunjukkan bahwa sektor tersebut merupakan sektor unggulan di wilayah tersebut. Menurut Indriani dan Mukhyi (2013), sektor unggulan adalah kegiatan ekonomi tertentu yang memiliki potensi, kinerja, dan prospek yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya. Sektor-sektor ini dimaksudkan untuk merangsang kegiatan ekonomi terkait lainnya dan berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang otonom. Raqib dan Rofiuddin (2018) berpendapat bahwa sektor-sektor tertentu yang disebut sektor unggulan mempunyai kemungkinan lebih besar untuk mengalami pertumbuhan lebih cepat dibandingkan sektor-sektor lain di suatu lokasi tertentu. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya variabel-variabel pendukung seperti akumulasi modal, peningkatan tenaga kerja, dan kemajuan teknis.

Hutabarat (2020) menjelaskan bahwa suatu daerah akan memiliki sektor dominan jika mampu bersaing secara efektif dengan daerah lain di sektor yang sama, sehingga memungkinkannya melakukan kegiatan ekspor. Industri unggulan di suatu daerah mempunyai potensi pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan sektor lainnya. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh adanya variabel pendukung seperti akumulasi modal, lapangan kerja, dan kemajuan teknologi (Nurlina et al., 2019).

### **2.1.2 Analisis *Location Quotient* dalam Penentuan Sektor Unggulan**

Metode *Location Quotient* (LQ) sering digunakan untuk mengidentifikasi industri unggulan. Analisis *location quotient* (LQ) digunakan untuk menentukan kepentingan relatif suatu sektor ekonomi di lokasi tertentu

(wilayah analisis) dengan membandingkannya dengan sektor yang sama di wilayah yang lebih luas (wilayah referensi). Analisisnya bergantung pada kategorisasi sektor, khususnya yang mengkaji ekspansi dan dampak beberapa industri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) regional secara keseluruhan. Analisis LQ akan menghasilkan penilaian komparatif terhadap kapasitas sektor di wilayah analisis dalam kaitannya dengan kapasitas sektor yang sama di wilayah acuan.

### **2.1.3 Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)**

Teori basis ekonomi bergantung pada suatu tempat tertentu dan menjelaskan kuantitas keunggulan komparatif yang dimiliki suatu wilayah tertentu (Wicaksono, 2019). Apabila suatu daerah mempunyai banyak sektor yang mampu bersaing dengan sektor-sektor di luar daerahnya sehingga memungkinkan terjadinya ekspor barang ke daerah lain, maka tidak dapat dipungkiri akan terjadi lonjakan ekspor yang akan berdampak besar dan menguntungkan bagi perekonomian daerah tersebut.

Perekonomian daerah terdiri dari dua sektor yang berbeda: sektor kegiatan basis dan sektor kegiatan non-basis. Sektor primer mengacu pada kegiatan ekonomi yang melibatkan ekspor barang atau jasa ke luar batas ekonomi masyarakat lokal, sehingga menarik kemakmuran eksternal. Di sisi lain, sektor non-primer melayani kebutuhan individu yang berada dalam batas ekonomi masyarakat dan tidak melakukan ekspor.

Aktivitas dari sektor basis berperan sebagai roda penggerak utama (*primer mover*) terhadap pertumbuhan suatu wilayah. Hal ini disebabkan oleh

semakin tinggi angka ekspor ke wilayah lain maka akan semakin meningkat pendapatan di daerah tersebut yang akan mendorong pertumbuhan, demikian pula sebaliknya.

#### **2.1.4 Pembangunan Sektor Unggulan dan Strategi Pembangunan**

##### **Daerah**

Persoalan utama dalam pembangunan daerah adalah penetapan prioritas rencana pembangunan yang fokus pada spesialisasi wilayah tertentu (pembangunan endogen) melalui pendayagunaan sumber daya manusia (Raqib dan Rofiuddin, 2018). Menurut Safi'i (2007) dalam buku "Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah," pendekatan terkini terhadap strategi pembangunan ekonomi daerah mencakup unsur-unsur sebagai berikut:

Pembangunan dilakukan dengan menilai potensi daerah tertentu dan menyelaraskannya dengan kebutuhan dan kapasitas daerah untuk melaksanakan inisiatif pembangunan. Pembangunan tersebut harus dikaitkan dengan beberapa variabel, antara lain sosial, politik, hukum, budaya, birokrasi, dan lain-lain, bukan hanya dikaitkan dengan sektor ekonomi saja. Pembangunan yang dilakukan secara berurutan berdasarkan skala prioritas juga dapat memberikan dampak positif bagi bidang lainnya. Sektor ekonomi potensial adalah sektor yang mempunyai kapasitas produksi lebih besar dibandingkan sektor yang sama di daerah lain. Artinya daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri dan juga bisa mengekspor ke daerah lain. Kegiatan ekspor ini akan meningkatkan pendapatan dan mendorong banyak sektor ekonomi, mendorong penggunaan sumber daya ekonomi yang kurang

dimanfaatkan, dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum. Untuk menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja baru bagi masyarakat, perlu disusun strategi pemanfaatan potensi perekonomian masing-masing daerah. Strategi-strategi ini harus didasarkan pada peluang dan potensi unik yang melekat pada masing-masing daerah, dan harus dibarengi dengan kebijakan pemerintah daerah yang kondusif terhadap lingkungan usaha.

### **2.1.5 Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang selalu hadir di masyarakat, khususnya di daerah berkembang. Menurut BPS (2016), kemiskinan mengacu pada suatu keadaan ketika individu tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok makanan dan non-makanan, yang diukur dengan pengeluaran mereka. Pengukuran kemiskinan ditentukan berdasarkan Garis Kemiskinan yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Garis kemiskinan pangan mewakili jumlah uang yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pangan minimum, yang ditentukan berdasarkan asupan harian sebesar 2.100 kalori per orang. Di sisi lain, garis kemiskinan non-makanan memperhitungkan kebutuhan minimal sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan mendasar lainnya. Selain garis kemiskinan, penelitian ini juga menggunakan ukuran yang disebut Persentase Penduduk Miskin. Head Count Index (HCI) mewakili proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Analisis terhadap sektor unggulan di suatu wilayah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perluasan angkatan kerja lokal secara

signifikan (Putri & Cahyono, 2021). Dengan jumlah sektor unggulan yang tinggi, seharusnya dapat menekan angka pengangguran di daerah tersebut. Hal ini terjadi sebab dengan peningkatan sektor unggulan maka akan menyerap tenaga kerja di daerah tersebut, terserapnya tenaga kerja akan menekan angka pengangguran. Maryanti & Rasyad (2015) dalam penelitiannya, sektor basis memegang peranan penting dalam perekonomian karena terbukti mampu menyerap tenaga kerja lebih besar dibandingkan sektor non basis.

Diakui secara luas bahwa pertumbuhan ekonomi yang kuat merupakan indikasi keberhasilan pembangunan. Dalam studi ini, pertumbuhan ekonomi mengacu pada jumlah sektor unggulan di suatu wilayah, yang kemudian mengarah pada penurunan tingkat kemiskinan melalui efek tetesan ke bawah (*trickle-down effect*). Pencapaian kolektif dari sekelompok individu akan mempunyai dampak yang berjenjang, menciptakan lapangan kerja dan prospek ekonomi yang beragam yang akan memfasilitasi terciptanya keadaan yang adil untuk berbagi manfaat dari ekspansi ekonomi. Alokasi sumber daya yang adil pada awalnya akan menguntungkan kelompok kaya dan kemudian memperluas dampaknya kepada kelompok kurang mampu, sehingga berkontribusi terhadap pengurangan angka kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

## 2.2 Studi Terkait

Pada dasarnya penelitian mengenai sektor unggulan dan pengaruhnya terhadap kemiskinan telah banyak studi yang melakukannya. Beberapa penelitian terkait dengan materi tersebut yaitu diantaranya adalah penelitian yang berjudul “Analisis Sektor Basis PDRB Dalam Pengentasan Kemiskinan

Melalui Pembangunan Inklusif di Kabupaten Lombok Tengah” oleh Utama pada tahun 2018. Penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Lombok Tengah, masih terdapat sektor-sektor unggulan di setiap daerah yang belum tergarap secara maksimal potensinya. Kurang meratanya distribusi manfaat di masyarakat terlihat dari disparitas antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan, meskipun terdapat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Hal ini dapat disebabkan oleh tidak efektifnya mekanisme *trickle-down* dan tidak menjamin pemerataan kesejahteraan masyarakat. Proses *trickle-down* terhambat oleh kurangnya koordinasi antar berbagai pihak di daerah, sehingga mengakibatkan kegagalan dalam mendorong pembangunan daerah secara kolektif. Selain itu, komunikasi yang kurang intensif dengan pemerintah kabupaten/kota juga menyebabkan kurang maksimalnya hasil program pemerintah di masing-masing daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan LQ untuk membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Lombok Tengah dengan PDRB Provinsi NTB. Berdasarkan hasil perhitungan, faktor utama yang berkontribusi terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lombok Tengah adalah terus meningkatnya nilai tambah sektor transportasi dan pergudangan dari waktu ke waktu. Industri pariwisata di Provinsi NTB dipandang sebagai katalisator yang signifikan, sehingga menjadikannya sebagai tujuan wisata terpopuler kedua di Indonesia. Permasalahan kemiskinan di Lombok Tengah khususnya di Provinsi NTB berkisar pada masalah ketenagakerjaan. Meskipun jumlah pekerjaanya banyak, lapangan kerja yang tersedia sangat sedikit. Industri pengolahan dipengaruhi

oleh pertumbuhan sektor pariwisata yang ditopang oleh sektor pertanian dan transportasi.

Hardiani (2012) melakukan penelitian dengan judul “Dampak Pertumbuhan Sektor Ekonomi Dasar Terhadap Kemiskinan di Provinsi Jambi”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor ekonomi primer dan menilai pengaruh pertumbuhannya terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jambi. Metode LQ digunakan untuk mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dengan memanfaatkan data PDRB Provinsi Jambi, PDB Indonesia, dan jumlah penduduk miskin di Provinsi Jambi. Untuk menguji pengaruh pertumbuhan sektor ekonomi fundamental terhadap kemiskinan di Provinsi Jambi digunakan model analisis regresi linier berganda. Berdasarkan kajian LQ dengan menggunakan data tahun 2000 hingga 2010, diketahui bahwa Provinsi Jambi memiliki lima sektor unggulan dari total sembilan sektor. Kelima sektor tersebut meliputi pertanian, pertambangan dan penggalian, pengangkutan dan komunikasi, energi, gas, dan air bersih, serta perdagangan, hotel, dan restoran. Kelima sektor ekonomi fundamental tersebut merupakan sektor yang mempunyai potensi dan kemampuan yang cukup besar dalam mendorong dan mempercepat proses pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jambi. Laju pertumbuhan sektor ekonomi primer di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa sektor listrik, gas, dan air bersih mempunyai laju pertumbuhan tertinggi. Melalui pengujian model regresi, terlihat bahwa peningkatan sektor fundamental perekonomian tidak memberikan dampak yang besar terhadap derajat kemiskinan di Provinsi Jambi, baik secara simultan maupun parsial.

Retnasih (2022) dengan judul “*Poverty Alleviation Strategy Through Leading Sector*” yang bertujuan untuk mengetahui sektor unggulan dan strategi pengentasan kemiskinan melalui sektor unggulan di Kabupaten Kulon Progo. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode LQ, analisis Shift Share dan analisis SWOT. Berdasarkan hasil perhitungan LQ, Kabupaten Kulon Progo memiliki sektor dengan  $LQ > 1$  seperti sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor, sektor transportasi dan pergudangan, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib serta sektor jasa lainnya. Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh kekuatan Kab. Kulon Progo memiliki potensi ekonomi dari sektor basis, didukung dengan program pemberantasan kemiskinan dari pemerintah, program peningkatan air bersih dan sanitasi yang baik yang juga dikelilingi oleh banyak komunitas yang mendukung pemberdayaan masyarakat. Namun, terdapat kelemahan yang mencakup banyaknya tenaga kerja dengan pendidikan yang rendah, tenaga kerja yang tidak kompetitif serta infrastruktur yang tidak memadai. Peluang yang terdapat berasal dari efek multiplier oleh Bandara YIA (*Yogyakarta International Airport*), dukungan dari pemerintah daerah setempat dalam pengentasan kemiskinan. Kab. Kulon Progo juga memiliki ancaman seperti pandemic COVID-19, ketergantungan masyarakat miskin yang meningkat, lokasi geografi yang cenderung tinggi prospek terjadinya bencana alam. Program “Semangat Bela-Beli Kulon Progo” yang menekankan untuk

seluruh lapisan masyarakat menggunakan produk lokal Kab. Kulon Progo agar terciptanya kemandirian daerah, dan dalam implementasinya, program ini memiliki dampak yang baik terhadap pengentasan kemiskinan, dan juga mendorong, pertumbuhan ekonomi lokal baik dari grosir dan ritel.

Penelitian oleh Indriani dan Mukhyi (2013) dengan judul “Sektor Unggulan Perekonomian Indonesia: Pendekatan Input-Output” Salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi adalah tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang mengarah pada kemajuan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor yang kinerjanya lebih baik dari perekonomian Indonesia, dengan tujuan untuk menentukan kebijakan yang diperlukan dan menilai indeks pendapatan masyarakat di berbagai sektor. Penelitian ini menggunakan metodologi Input-Output (I-O) dengan menggunakan data terkini dari Indonesia pada tahun 2008. Berdasarkan perhitungan tabel Input-Output, terdapat 12 sektor ekonomi yang menjadi sektor primer perekonomian Indonesia pada tahun 2008 hingga 2013. Industri perdagangan merupakan sektor yang dominan di Indonesia karena melimpahnya sumber daya alam dan sumber daya manusia, sehingga diharapkan dapat menciptakan lebih banyak prospek pertumbuhan. Penghasilan dari pekerjaan dan kontribusi dari masyarakat. Sektor industri kimia serta bisnis pupuk dan pestisida merupakan sektor penting di Indonesia karena besarnya sumber daya bahan baku yang belum dimanfaatkan. Dengan memperoleh data mengenai industri-industri unggulan di Indonesia, diharapkan

pemerintah akan memprioritaskan sektor ini untuk membangun keunggulan kompetitif. Menggunakan tabel Input Output untuk Indonesia sebagai referensi Pada tahun 2008, analisis komprehensif terhadap indeks pendapatan masyarakat menunjukkan bahwa hanya enam sektor yang tercakup dalam 25 sektor indeks tersebut. Sektor-sektor tersebut antara lain sektor jasa-jasa lainnya, sektor militer, sektor industri pupuk dan pestisida, sektor peternakan, sektor perdagangan, dan sektor bangunan. Nampaknya enam dari 12 sektor unggulan di Indonesia mempunyai nilai indeks pendapatan di bawah satu. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut tidak menghasilkan pendapatan atau memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan pekerja di sektor-sektor tersebut. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian komprehensif dan menerapkan perbaikan untuk memahami alasan di balik kurangnya pengaruh positif industri terkemuka ini terhadap pertumbuhan pendapatan individu.

Muhammad *et al.*, (2021) dalam penelitian yang berjudul “Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Saat Ini Dan Di Masa Depan Dalam Upaya Pengurangi Jumlah Kemiskinan Di Kabupaten Lombok Utara Provinsi Nusa Tenggara Barat” Tujuan dari studi ini adalah untuk mengidentifikasi sektor-sektor ekonomi unggulan saat ini dan masa depan yang dapat dipromosikan untuk mengentaskan kemiskinan, serta menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kemiskinan di lima kecamatan di Kabupaten Lombok Utara. Teknik analisis yang digunakan meliputi SLQ (Static Location Quotient) dan

DLQ (Dynamic Location Quotient), serta regresi dasar dan tabulasi distribusi frekuensi menggunakan data PDRB Kabupaten. Topik pembahasannya adalah penduduk yang hidup dalam kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) provinsi Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Melalui integrasi perhitungan SLQ dan DLQ, ditentukan bahwa saat ini terdapat dan akan terus menjadi enam sektor unggulan di tahun-tahun mendatang. Sektor-sektor ini meliputi pengadaan listrik dan gas, penyediaan air, pengelolaan dan daur ulang limbah, konstruksi, informasi dan komunikasi, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, serta layanan kesehatan dan kegiatan sosial. Melalui analisis regresi dasar, diketahui bahwa terdapat korelasi terbalik antara pertumbuhan ekonomi dan prevalensi kemiskinan. Secara khusus, peningkatan pertumbuhan ekonomi menyebabkan penurunan jumlah individu yang hidup dalam kemiskinan.

Pada tahun 2015, Jauhariyah melakukan penelitian dengan judul “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Kajian Potensi Sektor Basis di Kabupaten Banyuwangi” dengan tujuan untuk mengidentifikasi sektor basis di Kabupaten tersebut. Kunjungi Banyuwangi untuk mengamati keberadaan kemiskinan di banyak wilayah di kabupaten ini. Banyuwangi sudah familiar dengan pendekatan kebijakan pengentasan kemiskinan untuk mengembangkan potensi daerah di Kecamatan Wongsorejo, Kalipuro, dan Licin. Metodologi yang digunakan antara lain LQ (Location Quotient), Tipologi Klassen, Analisis Shift Share, dan Analisis Kebijakan/AHP (Analytical Hierarchy Process) dengan memanfaatkan data PDRB Kabupaten. Data yang diberikan berkaitan

dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi, sebuah provinsi di Jawa Timur, Indonesia. Data tersebut secara khusus berfokus pada sektor perekonomian di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2009 dan 2010. Analisis LQ menunjukkan adanya sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor keuangan, persewaan, dan jasa korporasi. Berdasarkan temuan analisis Tipologi Klassen, sektor pertanian tergolong industri maju dan berkembang pesat. Oleh karena itu, perlu diprioritaskan oleh pemerintah daerah untuk dikembangkan lebih lanjut. Hal ini sangat penting ketika mempertimbangkan kegiatan perencanaan untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten. Dalam rangka membangun Banyuwangi ke depan, perlu disusun strategi pada sembilan sektor yang ada: Sektor Pertanian, Sektor Pertambangan dan Penggalian, Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Sektor Konstruksi, Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, Industri Pengolahan, Sektor, Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, serta Sektor Jasa Transportasi dan Komunikasi. Tujuannya adalah untuk memprioritaskan pengembangan sektor-sektor tersebut dan menjadikannya sebagai sektor kunci di kabupaten tersebut. Banyuwangi berfungsi sebagai kerangka kebijakan untuk memastikan bahwa kebijakan tepat sasaran, hemat waktu dan biaya, serta mempercepat kesejahteraan masyarakat. Hasil studi Shift Share menjelaskan pentingnya PDRB sektoral kabupaten. Perkembangan Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi nasional, komposisi industri, dan daya saing. Komponen bauran industri mengkuantifikasi sejauh mana perubahan perekonomian suatu

wilayah akibat variasi komposisi industri. Berdasarkan temuan analisis AHP, terlihat bahwa sektor pertanian mempunyai peranan yang cukup besar, yakni menyumbang 46,3% terhadap keseluruhan kontribusi. Sektor ini memberikan kontribusi yang besar terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan statistik kemiskinan di Kab. Di Banyuwangi, terbukti masyarakat miskin mempunyai harapan besar terhadap pemerintah dalam hal bantuan keuangan. Harapan tersebut semakin diperkuat dengan aspirasi mereka untuk meningkatkan produktivitas melalui program pelatihan yang diselenggarakan oleh Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan.

